

KINERJA

BAG. HUKUM

LAPORAN

2019

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Hukum merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Bagian Hukum Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Bagian Hukum sebagai bagian dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Bagian Hukum juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bagian Hukum di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Bagian Hukum

Wahyu Wibawa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Tahun 2019 telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN dan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Bagian Hukum.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Bagian Hukum tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum	1 Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	22 Peraturan	27 Peraturan	122,73
		2 Jumlah keputusan Kepala BSN yang ditetapkan	530 Dokumen	841 Dokumen	158,68
		3 Prosentase pemberian bantuan hukum	90 %	100 %	111,11
		4 Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	22 Penyuluhan Hukum	27 Penyuluhan Hukum	122,73
		5 Pendokumentasian hukum	574 Dokumen Hukum	1757 Dokumen Hukum	306,10
		6 Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan	574 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	891 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	155,23
2	Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	7 Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum	3,5	3,2	91,43

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Bagian Hukum, 6 (enam) mencapai target antara lain:

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebesar 22 peraturan perundang-undangan telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 27 peraturan perundang-undangan.

pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum—dengan indikator kinerja Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan sebesar 530 dokumen telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 841 dokumen. Adapun capaian yang dihasilkan Keputusan Kepala BSN yang terkait penetapan SNI, Komite Teknis dan Keputusan Kepala BSN selain SNI dan Komtek.

pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum—dengan indikator kinerja prosentase pemberian bantuan hukum sebesar 90% telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 100%.

pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah penyuluhan hukum sebanyak 22 penyuluhan hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 27 penyuluhan hukum.

pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja pendokumentasian hukum sebesar 574 dokumen hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 1757 dokumen hukum.

pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah dokumen hukum yang diinformasikan sebesar 574 dokumen hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 891 dokumen hukum.

sedangkan 1 (satu) target yang tidak tercapai adalah:

pencapaian sasaran Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH dengan indikator kinerja Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum sebesar 3,5 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 3,2.

khususnya Bagian Hukum dalam rangka untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan:

- 1) melakukan monitoring progres penyusunan RPBSN tahun berjalan terhadap usulan RPBSN dari unit internal BSN yang termasuk Program Penyusunan Perka BSN Tahun 2019 maupun yang diluar Program Penyusunan;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang diusulkan;

- 3) melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan PBSN pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembentukan PBSN tahun berikutnya.
- 4) melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan layanan hukum kepada stakeholder, antara lain penyederhanaan birokrasi, dan pengembangan dan penggunaan sistem informasi dalam pemberian layanan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Maksud dan Tujuan	7
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.4 Sumber Daya Manusia	9
I.5 Peran Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	11
II.1.1 Visi dan Misi	11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	11
II.2 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	15
III.2 Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	
Penutup	31
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	

I.1 LATAR BELAKANG



etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi.

Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Hukum, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Hukum memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Sumber Daya Manusi, Organisasi, dan Hukum dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusi, Organisasi, dan Hukum tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan Biro Sumber Daya Manusi, Organisasi, dan Hukum, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

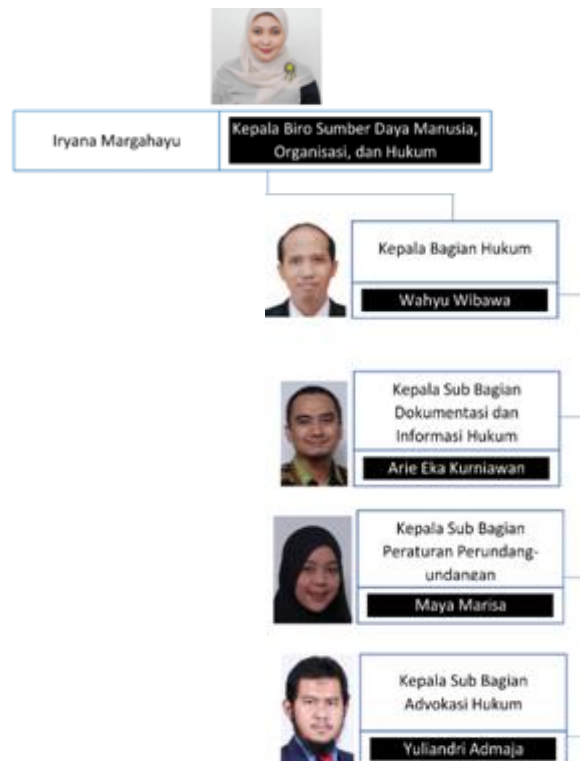
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan tersebut, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan pendokumentasian hukum serta pemberian informasi hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang - undangan;
- c. pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum; dan
- d. pelaksanaan pendokumentasian dan pemberian informasi hukum.

Struktur Bagian Hukum dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian HUKUM

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Hukum mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
2. Subbagian Advokasi Hukum melakukan tugas analisis peraturan, pemberian pendapat hukum, pendampingan, bantuan dan penyuluhan hukum.
3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pendokumentasian dan pemberian informasi hukum.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Biro SDMOH BSN memiliki personel sebanyak 8 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1 Personel ASN Bagian Hukum

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Bagian Hukum	1
2.	Kepala Sub Bagian	3
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	5
4.	Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
	Jumlah	11

Tabel I. 2 Jenjang Pendidikan Bagian Hukum

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	2
2.	S1	9
	Jumlah	11

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bagian Hukum pada Biro SDMOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kajian hukum, konsultasi, bantuan hukum dan pendokumentasian hukum serta pemberian informasi hukum.

I.6 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2019 Bagian Hukum pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum menghadapi tantangan yang cukup besar antara ada reorganisasi BSN yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi BSN secara keseluruhan termasuk Bagian Hukum. Dengan adanya struktur organisasi BSN yang baru, Bagian Hukum memerlukan waktu untuk adaptasi dalam bisnis proses yang baru, yaitu pendokumentasian hukum dan pemberian informasi hukum.

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Menjadi unit yang dapat mewujudkan kepastian hukum, pelayanan kepegawaian dan organisasi dalam mendukung koordinasi dan pelayanan di BSN

MISI

1. Menyediakan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hukum dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Memberikan pelayanan prima kepegawaian BSN.
3. Melakukan penataan organisasi dan tatalaksana BSN

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, SDM dan Organisasi yang berkualitas.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum selaku Unit Pendukung di lingkungan BSN. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum) harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana, dan organisasi, serta pengelolaan hukum yang profesional.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan SDM
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan organisasi, dan Tata laksana
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran di lingkup Biro SDMOH

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Bagian Hukum Biro SDMOH BSN tahun 2019 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan:

Tabel II.1 Penetapan Kinerja Bagian Hukum Biro SDMOH BSN Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum	1. Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	22 Peraturan
		2. Jumlah keputusan Kepala BSN yang ditetapkan	530 Dokumen
		3. Prosentase pemberian bantuan hukum	90%
		4. Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	22 Penyuluhan hukum
		5. Pendokumentasian hukum	574 Dokumen hukum
		6. Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan	574 Informasi dokumen hukum dalam sistem informasi
2.	Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	7. Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum	3,5

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bagian Hukum Biro SDMOH BSN menetapkan 2 (dua) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bagian Hukum Biro SDMOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui:

Penyusunan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Statute for The Standards And Metrology Institute For Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam), dan Peraturan Badan Standardisasi Nasional;

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN,
melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Hukum, dilaksanakan melalui pelaksanaan advokasi hukum, dan Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja bagian hukum dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 1.1 Pencapaian Kinerja Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum	1 Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	22 Peraturan	27 Peraturan	122,73
		2 Jumlah keputusan Kepala BSN yang ditetapkan	530 Dokumen	841 Dokumen	158,68
		3 Prosentase pemberian bantuan hukum	90 %	100 %	111,11

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
		4 Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	22 Penyuluhan Hukum	27 Penyuluhan Hukum	122,73
		5 Pendokumentasian hukum	574 Dokumen Hukum	1757 Dokumen Hukum	306,10
		6 Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan	574 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	891 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	155,23
2	Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH	7 Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum	3,5	3,2	91,43

Tabel III.1.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Indikator Kinerja	Capaian 2018			Capaian 2019		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	8 peraturan perundang-undangan	15 peraturan perundang-undangan	187,50%	22 peraturan perundang-undangan	27 peraturan perundang-undangan	122,73 %
2 Jumlah keputusan Kepala BSN yang ditetapkan	500	710	142,00%	530 Dokumen	841 Dokumen	158,68%
3 Prosentase pemberian bantuan hukum	70 %	85 %	121,43%	90 %	100 %	111,11%
4 Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan	8 penyuluhan hukum	8 penyuluhan hukum	100,00%	22 Penyuluhan Hukum	27 Penyuluhan Hukum	122,73 %
5 Pendokumentasian hukum	-	-	-	574 Dokumen Hukum	1757 Dokumen Hukum	306,10%
6 Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan	-	-	-	574 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	891 Informasi Dokumen Hukum dalam Sistem Informasi	155,23%
7 Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum	-	-	-	3,5	3,2	91,43%

Pencapaian sasaran di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 1	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditetapkan

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebesar 22 peraturan perundang-undangan telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 27 peraturan perundang-undangan. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

Gambar Jumlah Peraturan BSN yang telah diinformasikan dalam JDIH

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional.
- 2) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengesahan *Statute for the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (Statuta Institut Standar dan Metrologi untuk Negara Islam)
- 3) Peraturan BSN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Karet dan Plastik
- 4) Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
- 5) Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Rumah Tangga non Elektronik, Olahraga dan Hiburan
- 6) Peraturan BSN Nomor 4 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material
- 7) Peraturan BSN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan dan Produk Penanganan Kesehatan
- 8) Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan
- 9) Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kimia
- 10) Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kertas dan Produk Berbahan Kertas
- 11) Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kayu, Produk Berbahan Kayu dan Furnitur
- 12) Peraturan BSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Tekstil dan Produk Pakaian
- 13) Peraturan BSN Nomor 11 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Kaca dan Keramik
- 14) Peraturan BSN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- 15) Peraturan BSN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- 16) Peraturan BSN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PBSN No 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
- 17) Peraturan BSN Nomor 15 Tahun 2019 tentang Logo Badan Standardisasi Nasional
- 18) Peraturan BSN Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

- 19) Peraturan BSN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Standardisasi Nasional
- 20) Peraturan BSN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencabutan 5 PBSN
- 21) Peraturan BSN Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- 22) Peraturan BSN Nomor 20 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian
- 23) Peraturan BSN Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia
- 24) Peraturan BSN Nomor 22 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Layanan Jasa Akreditasi dan Layanan Otoritas Sponsor pada Badan Standardisasi Nasional
- 25) Peraturan BSN Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
- 26) Peraturan BSN Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019
- 27) Peraturan BSN Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 2	Jumlah keputusan Kepala BSN yang ditetapkan

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja Keputusan Kepala BSN yang ditetapkan sebesar 530 dokumen telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 841 dokumen. Adapun capaian yang dihasilkan Keputusan Kepala BSN yang terkait penetapan SNI, Komite Teknis dan Keputusan Kepala BSN selain SNI dan Komtek.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1/KEP/BSN/1/2019
TENTANG
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan dalam rangka pengembangan Standar Nasional Indonesia pada Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Nasional Perumusan Standar Nasional Indonesia Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 797/KEP/BSN/12/2019
TENTANG
PENETAPAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 65-15 HORTIKULTURA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perumusan Standar Nasional Indonesia di bidang Hortikultura, perlu mengangkat Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-15 Hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-15 Hortikultura;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

Gambar Surat keputusan Kepala BSN yang telah ditetapkan

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 3	Prosentase pemberian bantuan hukum

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja prosentase pemberian bantuan hukum sebesar 90% telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 100%. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

- 1) pendampingan hukum litigasi sebanyak 2 pendampingan litigasi dalam perkara hukum gugatan perdata.



Gambar pendampingan hukum litigasi

- 2) pendampingan hukum non litigasi berupa pendampingan pemberi Keterangan Ahli dan pegawai yang dipanggil aparat penegak hukum sebanyak 8 pendampingan nonlitigasi.



Gambar pendampingan hukum non litigasi

- 3) pemberian konsultasi dan pendapat hukum terkait penyusunan rancangan kerjasama antara BSN dengan subyek hukum lain sebanyak 25 kegiatan.



Gambar keikutsertaan dalam penyusunan rancangan kerjasama antara BSN

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 4	Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan

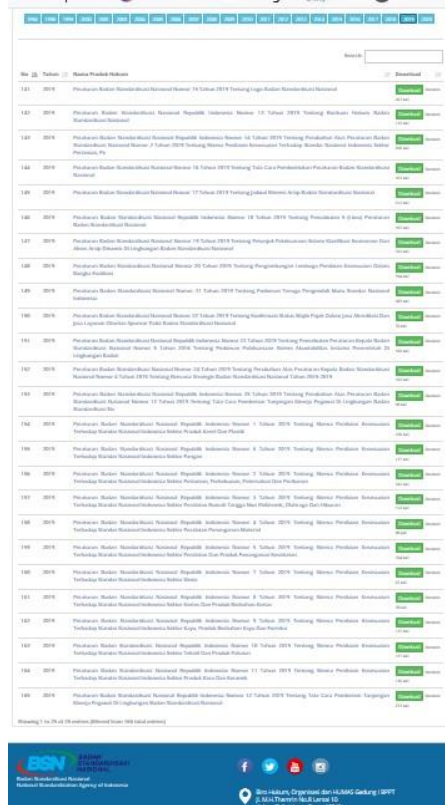
Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan sebesar 27 penyuluhan hukum telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu 27 penyuluhan hukum. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

- 1) kegiatan penyuluhan hukum Peraturan BSN mengenai Skema Penilaian Kesesuaian dan Tunjangan Kinerja di Lingkungan BSN melalui media tatap muka sebanyak 12 penyuluhan hukum



Gambar penyuluhan hukum Peraturan BSN

- 2) kegiatan penyuluhan hukum tentang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan BSN melalui media komunikasi secara elektronik sebanyak 27 penyuluhan hukum



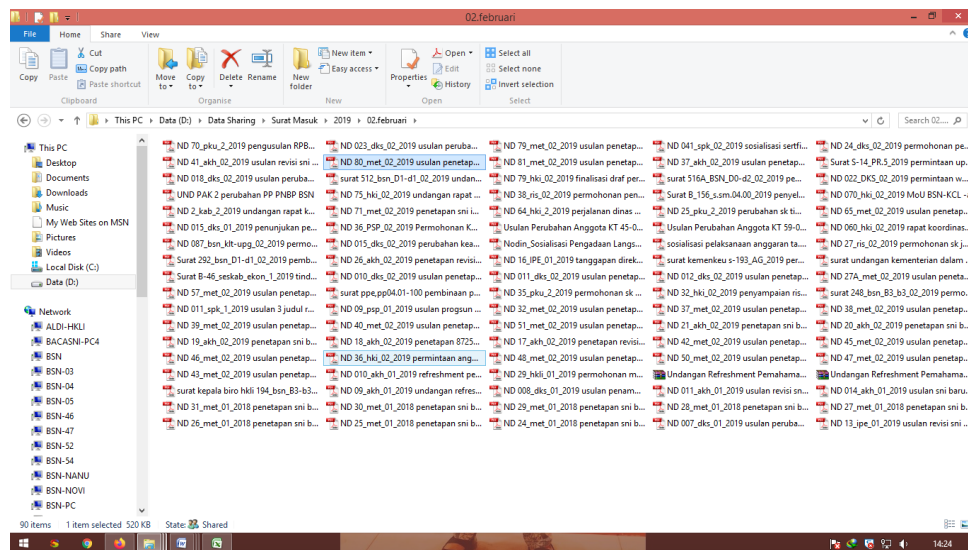
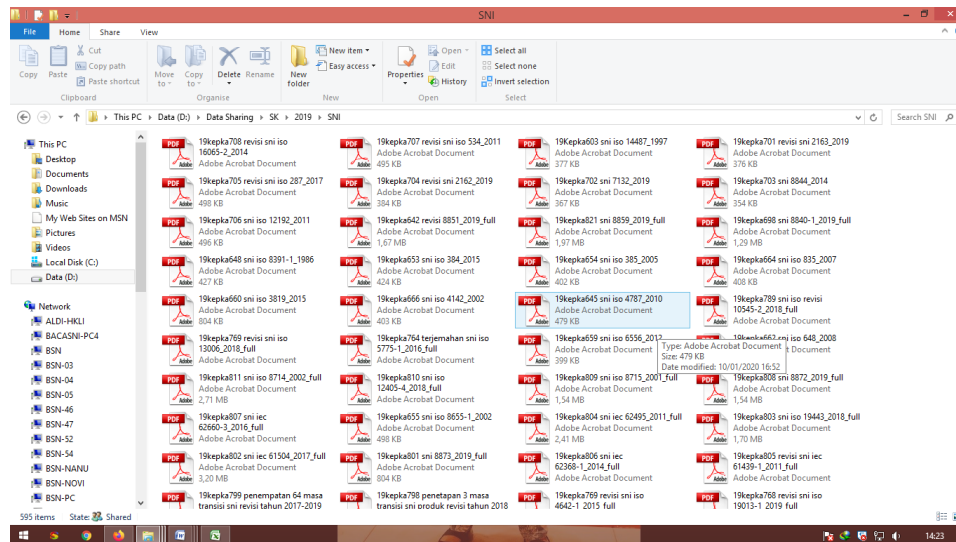
Penyuluhan hukum Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan BSN di JDIIH BSN

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 5	Pendokumentasian hukum

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja pendokumentasian hukum sebesar 574 dokumen hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 1757 dokumen hukum. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

- 1) kegiatan pendokumentasian Nota Dinas permintaan penerbitan Keputusan Kepala BSN, usul RPBSN dari unit pengusul sebanyak 866 dokumen

2) kegiatan pendokumentasian Keputusan Kepala BSN, PBSN dan data penyuluhan hukum sebanyak 891 Dokumen

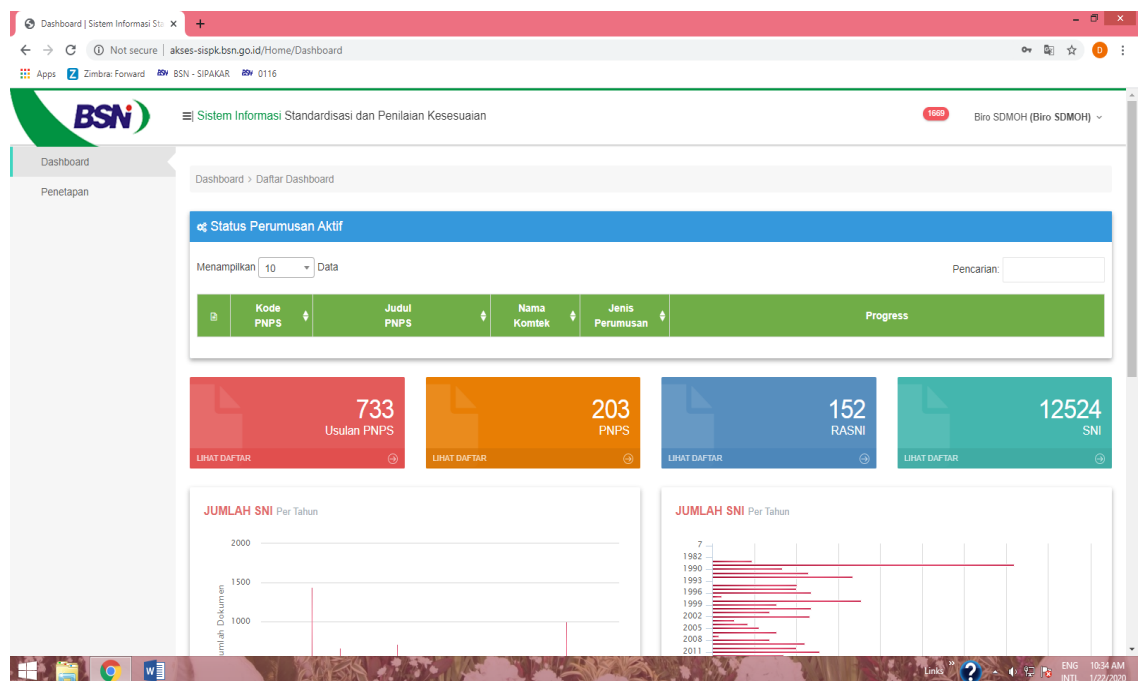


Gambar Dokumen hukum yang didokumentasikan

SASARAN 1	Meningkatkan kinerja pengelolaan hukum
INDIKATOR KINERJA 6	Jumlah dokumen hukum yang diinformasikan

Tahun 2019, pencapaian sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan hukum dengan indikator kinerja jumlah dokumen hukum yang diinformasikan sebesar 574 dokumen hukum telah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 891 dokumen hukum. Adapun capaian yang dihasilkan sebagai berikut:

- 1) kegiatan menginformasikan dokumen Keputusan Kepala BSN mengenai penetapan SNI di SISPK



Gambar dokumen hukum yang diinformasikan di SISPK

- 2) kegiatan menginformasikan dokumen Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, PBSN, penyuluhan hukum dan Keputusan Kepala BSN selain penetapan SNI di JDIH BSN



Peraturan Hukum

1994 1998 1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Search:

No	Tahun	Nama Produk Hukum	Download
375	2019	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 157/KEP/BSN/4/2019 Tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Karet Dan Barang Karet	Download Diunduh 14 kali
376	2019	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 158/KEP/BSN/4/2019 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 83-01 Karet Dan Barang Karet	Download Diunduh 14 kali
377	2019	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 159/KEP/BSN/4/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 26/KEP/BSN/3/2018 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Dan Keanggotaan Komite Teknis	Download Diunduh 10 kali
378	2019	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 388/KEP/BSN/8/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 194/KEP/BSN/7/2017 tentang Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 27-07 Sistem Refrigeran	Download Diunduh 5 kali
379	2019	Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 161/KEP/BSN/4/2019 Tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 07-03 Nanoteknologi	Download Diunduh 12 kali

Gambar dokumen hukum yang diinformasikan di JDIIH

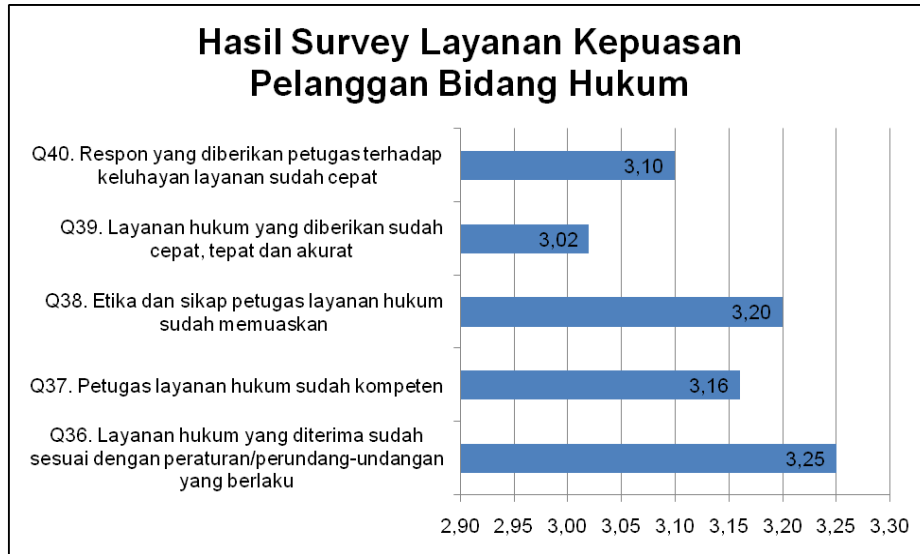
SASARAN 2	Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH
INDIKATOR KINERJA 7	Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum

Tahun 2019, pencapaian sasaran Indeks kepuasan layanan internal Biro SDMOH dengan indikator kinerja Indeks kepuasan layanan internal Bagian Hukum sebesar 3,5 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 3,2. Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa kecepatan, ketepatan, dan keakuratan layanan hukum kepada *stakeholder* harus ditingkatkan. Adapun data hasil penilaian survey sebagai berikut:

Survey Layanan Biro SDMOH 2019			
No	Pernyataan		
1	Apakah anda pernah menerima layanan Hukum? (SK, Perka, HAKI, Pendampingan Hukum, Bantuan Hukum, dll)		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Ya	56,98%	98
	Tidak	43,02%	74
		<i>Answered</i>	172
		<i>Skipped</i>	43
2	Layanan Hukum apa saja yang sudah pernah diterima di tahun 2019?		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Layanan Penetapan Keputusan Badan	73,63%	67
	Layanan Penyusunan Peraturan Badan	39,56%	36
	Layanan Bantuan Hukum	7,69%	7
	Layanan Kajian Hukum	7,69%	7
	Layanan Pengurusan Kekayaan Intelektual	6,59%	6
	Layanan Pendampingan Hukum	5,49%	5
	Layanan Penyusunan Perjanjian Nasional/Internasional	14,29%	13
	Layanan Penyuluhan Hukum	7,69%	7
	Layanan Dokumentasi dan Layanan Informasi Hukum	26,37%	24
		<i>Answered</i>	91
		<i>Skipped</i>	124
3	Layanan hukum yang diterima sudah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Sangat Setuju	26,32%	25
	Setuju	72,63%	69
	Kurang Setuju	1,05%	1
	Tidak Setuju	0,00%	0
		<i>Answered</i>	95
		<i>Skipped</i>	120
4	Petugas layanan hukum sudah kompeten		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Sangat Setuju	21,05%	20
	Setuju	73,68%	70
	Kurang Setuju	5,26%	5
	Tidak Setuju	0,00%	0
		<i>Answered</i>	95

Survey Layanan Biro SDMOH 2019			
No	Pernyataan		
		<i>Skipped</i>	120
5	Etika dan sikap petugas layanan hukum sudah memuaskan		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Sangat Setuju	23,40%	22
	Setuju	73,40%	69
	Kurang Setuju	3,19%	3
	Tidak Setuju	0,00%	0
		<i>Answered</i>	94
		<i>Skipped</i>	121
6	Layanan hukum yang diberikan sudah cepat, tepat dan akurat		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Sangat Setuju	15,79%	15
	Setuju	70,53%	67
	Kurang Setuju	13,68%	13
	Tidak Setuju	0,00%	0
		<i>Answered</i>	95
		<i>Skipped</i>	120
7	Respon yang diberikan petugas terhadap keluhan layanan sudah cepat		
	<i>Answer Choices</i>	<i>Responses</i>	
	Sangat Setuju	19,15%	18
	Setuju	71,28%	67
	Kurang Setuju	9,57%	9
	Tidak Setuju	0,00%	0
		<i>Answered</i>	94
		<i>Skipped</i>	121

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan melalui grafik dibawah ini



Berdasarkan data capaian kinerja dan data survey tahun 2019, Biro SDMOH khususnya Bagian Hukum dalam rangka untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan:

- 1) melakukan monitoring progres penyusunan RPBSN tahun berjalan terhadap usulan RPBSN dari unit internal BSN yang termasuk Program Penyusunan Perka BSN Tahun 2019 maupun yang diluar Program Penyusunan;
- 2) meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang diusulkan;
- 3) melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan PBSN pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembentukan PBSN tahun berikutnya.
- 4) melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan layanan hukum kepada stakeholder, antara lain penyederhanaan birokrasi, dan pengembangan dan penggunaan sistem informasi dalam pemberian layanan hukum.

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2019 ini Bagian Hukum pada Biro SDMOH didukung anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2019, tanggal 5 Desember 2018, pagu anggaran Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN sebesar Rp. **1.099.021.000,-** dan realisasi anggaran Bagian

Hukum pada Biro SDMOHBSN Tahun 2019 adalah sebesar Rp. **1.081.196.865,-** atau sebesar **98.38%**.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Hukum pada Biro SDMOHBSN tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro SDMOHBSN TA. 2019

Dalam rupiah

No	Uraian	2019		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	1.099.021.000,-	1.081.196.865,-	98.38%
	a. Layanan Hukum	321.940.000,-	317.620.885,-	
	b. Pengembangan Sistem SPK	777.081.000,-	763.575.980,-	

Perbandingan prosentase realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun 2019

No	Uraian	Realisasi	
		2018	2019
1	Bagian Hukum	96,44%	98.38%

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Hukum pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (SDMOH) BSN Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Hukum pada Biro SDMOH Tahun 2019 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN Tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Hukum pada Biro SDMOH BSN di tahun-tahun berikutnya.